

KOORDINASI DALAM MODEL PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) Studi Pada KTM Lagita (Lais, Giri Mulya, Ketahun), Kabupaten Bengkulu Utara

DODI HARSONO¹

AHMAD AMINUDIN²

¹⁾ *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
 University of Bengkulu*

²⁾ *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
 University of Bengkulu*

¹ E-mail: dodiharsono@gmail.com ² E-mail: achmad.aminudin.unib@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received: February 00, 00

Revised: March 00, 00

Accepted: March 00, 00

Available online: April 00, 00

KEYWORDS

*Coordination, Regional Development,
 Self sufficient integrated city model*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi koordinasi dalam pengembangan model kota mandiri terpadu (KTM) Lagita (Lais, Giri Mulya, Ketahun) di Bengkulu Utara. Metode yang digunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Kajian menunjukkan bahwa koordinasi pengembangan dan implementasi model kota mandiri terpadu (KTM) Lagita telah dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip koordinasi. Koordinasi mulai mengusulkan lokasi untuk pengendalian pembangunan dan pengembangan KTM. Koordinasi penggunaan media seperti surat, konsultasi dan pertemuan telah dilakukan tetapi tidak ada jadwal yang pasti saat dilaksanakan. Sektor terkait belum memiliki kesadaran bersama untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan KTM Lagita karena program tersebut dianggap sebagai program Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara. Disarankan agar seluruh kantor pusat dan instansi yang terlibat dalam proses pembangunan dan pengembangan KTM Lagita di Bengkulu Utara memiliki kesadaran untuk berkoordinasi, sehingga tidak perlu melihat dari mana inisiatif koordinasi tersebut berasal. Dan Dinas terkait diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan media koordinasi agar berjalan efektif dan efisien.

This is an open access article under the
 CC-BY-SA license



ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of coordination in the development of an integrated township model (KTM) of Lagita (Lais, Giri Mulya, Ketahun) in North Bengkulu. The method used is descriptive analysis with a qualitative approach through interviews, observation and documentation. Analysis of the data using an interactive analysis model. The study shows that the coordination of the development and implementation of the Lagita integrated city model (KTM) has been carried out through the application of coordination principles. The coordination began to propose locations for controlling the construction and development of KTM. Coordination of the use of media such as letters, consultations and meetings has been carried out but there is no definite schedule when it is carried out. Related sectors do not yet have a common awareness to contribute to the development and development of the Lagita KTM because the program is considered a program from the Department of Social Affairs, Manpower and Transmigration of North Bengkulu Regency. It is recommended that all head offices and agencies involved in the process of building and developing the KTM Lagita in North Bengkulu have the awareness to coordinate, so there is no need to look at where the coordination initiative came from. The Department of Social, Manpower and Transmigration of North Bengkulu Regency is expected to maximize the use of coordination media so that it runs effectively and efficiently.

PENDAHULUAN

KTM Lagita sendiri ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 137/MEN/VI/2008 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Tahun 2009. Wilayah pengembangan Kota Mandiri Lagita meliputi 27 Unit Pemukiman Transmigrasi yang sudah diserahkan (PTD) dan pemekaran desanya, 1 Unit Pemukiman Transmigrasi yang sedang dibina (PTA), dan 59 desa-desa sekitar, dengan luasan wilayah 99.251 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 158.111 jiwa. Pembangunan kota ini akan terealisasi dalam 5 tahun. Adapun kebutuhan anggaran melebihi Rp 60 miliar, yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten Bengkulu Utara, APBD Provinsi Bengkulu, dan lintas sektor.

KTM Lagita dirancang sebagai pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan komoditas pertanian. KTM Lagita direncanakan akan menjadi pusat kegiatan dan pelayanan agribisnis, pemuliaan tanaman unggul, pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian, industri dan jasa di Provinsi Bengkulu, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Lebih lanjut, pengembangan KTM Lagita dapat difokuskan untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru dengan mengembangkan konsep wirausaha di kawasan transmigrasi khususnya Kabupaten Bengkulu Utara. Pembangunan KTM Lagita diharapkan dapat mendorong terciptanya sekitar

15.500 orang wirausahawan baru di kawasan transmigrasi. Juga akan tercipta wirausahawan baru yang membantu menciptakan lapangan kerja baru sekitar 2.220 orang di sektor industri pengolahan pertanian dan 8.850 orang di sektor lainnya. Total tenaga kerja yang terserap di KTM Lagita ditargetkan sebanyak 26.570 orang.

Pembangunan KTM Lagita dimulai sejak tahun 2009. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta stakeholder lainnya dalam rangka pembangunan dan pengembangan KTM Lagita sebagaimana amanat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 214 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi. Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui APBD-nya mengalokasikan dana pembebasan lahan seluas 72 Ha, namun baru dapat dibebaskan seluas 43,977 Ha, sisanya akan dibebaskan pada tahun 2010 seluas 28,023 H. Dukungan APBD Kabupaten Bengkulu Utara di kawasan KTM Lagita tahun 2010 melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara antara lain; rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan, pembangunan jalan dan peningkatan, peningkatan jalan wilayah utara, peningkatan jalan wilayah selatan, pekerjaan pembangunan jalan boulevard sepanjang 1,2 km dan pembangunan dua Minimnya capaian pembangunan dan pengembangan KTM Lagita menunjukkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mengalami

berbagai hambatan. Sebagai gambaran sejak dibangun pada tahun 2009 fasilitas pendukung di kawasan KTM Lagita masih sangat terbatas dan belum ada fasilitas pendukungnya. Adanya hambatan koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan KTM Lagita perlu mendapat perhatian dari pemerintah; baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Sebagai sebuah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang secara holistic dan komprehensif, dengan cakupan pembangunan di segala bidang dengan melibatkan lintas instansi dan multisektor pembangunan KTM Lagita membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi instansi seluruh instansi yang terkait dengan pembangunan KTM Lagita. Oleh sebab itu, koordinasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta stakeholders lainnya menjadi kunci keberhasilan pembangunan KTM Lagita.

Koordinasi dalam pembangunan KTM Lagita pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan dan pengembangan KTM Lagita yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta stakeholders lainnya dalam pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri gapura KTM, selain itu ada beberapa badan usaha / investor yang menanamkan investasinya di kawasan KTM Lagita. (KTM) Lagita. Dari uraian tersebut maka koordinasi menjadi penting dalam upaya untuk dapat mencapai tujuan pembangunan KTM Lagita sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti akhirnya memutuskan untuk memfokuskan penelitian pelaksanaan koordinasi pada pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita Kabupaten Bengkulu Utara.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pemerintah terkait melakukan koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara? Dan apa kendala-kendala dalam pelaksanaan koordinasi pada pengembangan dan pembangunan KTM Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara dan mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pengembangan KTM Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik dari aspek praktis maupun aspek keilmuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2003:18), pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data

yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi.

Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Dari pengertian penelitian kualitatif di atas bukan berarti dalam penelitian kualitatif tidak boleh menggunakan data yang berupa angka. Dalam hal-hal tertentu data yang berupa angka dapat digunakan dalam pengumpulan data. Alasan penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena koordinasi instansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan KTM Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara.

Fokus penelitian ini secara konseptual koordinasi dalam pengembangan wilayah berbasis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita Kabupaten Bengkulu Utara adalah upaya untuk menyasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan dan pengembangan KTM Lagita yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta stakeholder lainnya.

Spradley dalam Sugiyono (2010: 286) menyatakan bahwa fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, gejala itu

bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (places), pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Penentuan jumlah informan berdasarkan pertimbangan tertentu, diambil dari orang-orang yang terlibat langsung dalam program Kota Terpadu Mandiri, dikarenakan mereka lebih memahami dan merasakan pelaksanaan program Kota Terpadu Mandiri ini. Informan dalam penelitian ini sebanyak empat belas orang, dengan rincian sebagai berikut: pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara tiga orang, pejabat eselon II dinas/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sembilan orang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten anggota komisi yang membidangi ketransmigrasian Bengkulu Utara satu orang, dan tokoh masyarakat Kecamatan Ketahun satu orang. Mereka dipilih sebagai informan karena memiliki keterkaitan dalam hubungan kerja program pembangunan Kota Terpadu Mandiri Lagita.

Pengumpulan data dari data primer berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui wawancara tentang program Kota Terpadu Mandiri Lagita di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara dengan tiga orang pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara, sembilan orang pejabat eselon II/kepala

dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, satu orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah komisi yang membidangi ketransmigrasian Kabupaten Bengkulu Utara, dan Satu orang tokoh masyarakat Kecamatan Ketahun.

Sementara itu data sekunder berupa dokumen dan file-file terkait program pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Lagita di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara yang mendukung atau berkaitan dengan hasil penelitian. Kunci dari data ini adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor 214 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi.

Teknik mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang sulit dan melelahkan karena data yang diambil dalam penelitian haruslah objektif. Oleh karenanya penulis memilih beberapa metode, antara lain: metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis interaksi atau interactive analysis models dengan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data (Data collection) dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan.
- b. Reduksi data (Data reduction) Apabila data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data.

Menurut Sugiyono (2006 : 338) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut: pertama, peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.

Peneliti juga mendeskripsikan terlebih dahulu hasil dokumentasi berupa progress pembangunan dan pengembangan KTM Lagita Kabupaten Bengkulu Utara sesuai apa adanya di lapangan. Setelah selesai, peneliti melakukan reflektif. Reflektif merupakan kerangka berpikir dan pendapat atau kesimpulan dari peneliti sendiri. Kedua, peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual sederhana berkaitan dengan fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti membaca dan mempelajari semua jenis data yang sudah terkumpul. Penyusunan satuan tersebut tidak hanya dalam bentuk kalimat faktual saja tetapi berupa paragraf penuh. Ketiga, setelah satuan diperoleh, peneliti membuat koding. Koding berarti memberikan kode pada setiap satuan. Tujuan koding agar dapat ditelusuri data atau satuan dari sumbernya.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti juga menyajikan data dalam gambar-gambar proses pembangunan dan pengembangan KTM Lagita. Tujuannya untuk memperjelas dan melengkapi sajian data.

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verification ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi dalam Pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi. Selain itu juga berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Lagita Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagitadi Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan pada Keputusan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.137/MEN/VI/2008 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Tahun 2009.

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa kebijakan program pembangunan dan pengembangan KTM Lagita mengacu pada ketentuan yang berlaku yakni Kepmen

Nomor 214 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi dan Kepmen Nomor 137/MEN/VI/2008 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi Tahun 2009. Kedua pedoman ketentuan tersebutlah yang menjadi acuan dalam melaksanakan percepatan terwujudnya pembangunan dan pengembangan KTM Lagita. Dalam pelaksanaannya di lapangan, kebijakan program pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dirasa akan memberi dampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pembangunan KTM yaitu Ketahun.

Dari pernyataan informan terlihat bahwa masyarakat memiliki perhatian dan harapan yang cukup besar terhadap pembangunan dan pengembangan KTM Lagita. Hal ini tentu beralasan karena memang salah satu sasaran pembangunan dan pengembangan KTM Lagita adalah dalam rangka terciptanya kesempatan kerja dan peluang berusaha di kawasan KTM Lagita Ketahun. Sehubungan dengan pelaksanaan koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan KTM Lagita Kabupaten Bengkulu Utara diperoleh berbagai informasi yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Koordinasi dilakukan Sejak Awal Kegiatan Pembangunan KTM Lagita

Pembangunan dan pengembangan KTM Lagita merupakan suatu kebijakan program transmigrasi pada tataran implementasi kebijakan. Sebagaimana layaknya suatu kebijakan dalam organisasi sebelumnya sudah melalui tahap perencanaan, demikian pula dengan program pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita.

Dari hasil wawancara terlihat bahwa koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri

(KTM) Lagita dilakukan sejak awal penyusunan program.

Pada tahap awal perencanaan setelah usul disetujui oleh kementerian, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyusun masterplan KTM yang memuat rencana pengembangan ruang, usaha ekonomi, pengembangan masyarakat yang dijabarkan didalam rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Selanjutnya masterplan KTM ditetapkan menjadi peraturan daerah. Tindak lanjutnya adalah rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang terdapat dalam masterplan dijabarkan dalam program pembangunan untuk dilaksanakan oleh instansi lintas sektor, badan usaha/swasta dan masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan program yang telah disepakati disosialisasikan kepada seluruh stakeholders yang terlibat didalam pembangunan dan pengembangan KTM. dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM di bentuk kelompok kerja di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Dari wawancara di atas juga terlihat bahwa program Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita merupakan kebijakan nasional sehingga pendanaannya juga berasal dari APBN. Sebagai pelaksana di daerah adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara. Disamping itu juga karena bersifat program nasional maka sangat memerlukan sinergi dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam program ini. Pihak-pihak tersebut adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara dan lintas sektor.

Menurut Kasubdit Pembinaan Transmigrasi dan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan (PTPMK) Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi R.I bahwa koordinasi dalam pembangunan transmigrasi dalam era otonomi daerah bersifat berjenjang, mulai dari kabupaten, provinsi dan kementerian. Demikian pula dalam hal perencanaannya dilakukan oleh daerah sementara pusat menyediakan perangkat aturan dan pedoman pelaksanaannya.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara menerangkan bahwa pejabat pusat (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI) selalu meminta keterangan kepada mereka dengan rinci baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (surat- menyurat). Hal ini tentu sangat membantu proses penyusunan kebijakan, terlebih jika menyangkut hal-hal yang pelaksanaannya di daerah bersifat teknis.

Sehubungan dengan hal diatas berdasarkan data yang dapat dihimpun dari hasil pengecekan ulang dengan Ketua Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara bahwa dalam rencana yang telah disusun dan dituangkan dalam masterplan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita yang terdiri dari beberapa bidang kegiatan yang telah menggariskan bahwa pelaksanaannya dalam bentuk satu paket kegiatan. Sedangkan kewenangan dalam melaksanakannya di daerah diberikan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara. Namun demikian ada beberapa bidang kegiatan dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan dinas/instansi dan swasta yang terkait. Dengan demikian kebijakan program pembangunan dan pengembangan KTM Lagita dilihat dari perencanaan, pendanaan dan pelaksanaannya merupakan penerapan asas dekonsentrasi.

Namun demikian selama proses pembangunan dan pengembangan KTM Lagita, masing-masing dinas/instansi tidak serta merta memasukkan program kegiatan

mereka ke lokasi pembangunan dan pengembangan KTM Lagita. Menurut informasi dari beberapa kepala dinas yang terkait bahwa hal ini disebabkan beberapa hal seperti:

- a. Para kepala dinas dan instansi terkait tidak mengetahui apa yang harus mereka kerjakan karena mereka menganggap tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana.
- b. Pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM Lagita dianggap merupakan wewenang dan tanggungjawab Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- c. Dikhawatirkan dapat menyebabkan tumpang tindih (overlaving) pekerjaan. Adanya keadaan demikian menyebabkan masing-masing dinas dan instansi yang terkait menjadi kurang kreatif dalam kegiatan program tersebut. Padahal dalam suatu organisasi perlu menumbuhkan kreatifitas masing-masing unit (bagian) yang ada (Hersey,1996:96).

Dalam penyusunan kebijakan agar memperoleh suatu kebijakan yang baik perlu adanya tindakan pengumpulan informasi dari berbagai pihak dan evaluasi (Hogerwerf, 1993 :68). Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan kebijakan. Dalam menyusun rencana program KTM Lagita, berdasarkan data yang diperoleh bahwa aparat pemerintah daerah (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara) sudah dilibatkan secara langsung. Namun ada sebagian dinas/instansi terkait yang menganggap tidak dilibatkan dikarenakan pada saat ekspose program mereka belum menjabat sehingga tidak ikut serta. Selain itu dalam kebijakan program transmigrasi terkait Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang sudah disusun oleh pemerintah pusat (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I), pada tahap implementasi di daerah kewenangan

sebenarnya berada pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara dengan mengikuti petunjuk/ketentuan yang berlaku (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : 214 tahun 2007 Tentang Pedoman Pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi).

Kontinuitas Koordinasi dalam Pembangunan dan Pengembangan KTM Lagita

Kontinuitas pelaksanaan koordinasi adalah suatu keadaan dimana selama proses pencapaian tujuan organisasi, kegiatan koordinasi berlangsung terus-menerus. Hal ini dapat dilihat dari aspek penggunaan media koordinasi yang digunakan. Kontinuitas pelaksanaan koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

1. Penggunaan media koordinasi melalui surat
2. Penggunaan media koordinasi melalui konsultasi
3. Penggunaan media koordinasi rapat/pertemuan

Pertemuan-pertemuan Bersama dalam Proses Pembangunan dan Pengembangan KTM Lagita

Dari hasil wawancara memperlihatkan bahwa selama proses kegiatan pembangunan dan pengembangan KTM Lagita rapat atau pertemuan yang melibatkan dinas dan instansi terkait telah dilakukan. Kegiatan rapat/pertemuan dilakukan sejak dimulainya program pembangunan dan pengembangan KTM Lagita. Kegiatan rapat/pertemuan berupa pengendalian pembangunan dan pengembangan KTM Lagita dilakukan melalui inisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan 1 tahun satu kali.

Rapat pengendalian pembangunan KTM Lagita tahun 2014 diadakan di Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 September 2014. Rapat monitoring ini dalam rangka mendapatkan gambaran perkembangan (progress) kegiatan pembangunan dan pengembangan KTM Lagita yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu kegiatan rapat/pertemuan bersama dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara jika merasa ada hal-hal yang harus disampaikan kepada dinas/instansi terkait dalam sebuah forum rapat.

Demikian pula hasil pengecekan ulang melalui wawancara dengan narasumber lain bahwa pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan KTM Lagita perlu disosialisasikan dan diketahui semua pihak. Khususnya kepada kepala-kepala dinas dan instansi yang terkait dengan program tersebut diundang dalam suatu rapat. Pada kesempatan tersebut disampaikan kepada mereka agar mengetahui keberadaan pelaksanaan dari program. Selain itu mengingat program tersebut merupakan program nasional yang datangnya dari pusat, maka semua pihak yang terkait di daerah perlu mendukung program tersebut. Koordinasi merupakan alat berbagi informasi (Ndraha dalam Alfian 2000:88). Untuk itu dalam penggunaan media koordinasi melalui pertemuan bersama-sama perlu mengikutsertakan semua pihak terkait.

Dengan demikian dalam pertemuan yang dibahas sesuatu hal diusahakan tidak hanya mengundang atau mengajak pihak-pihak yang hanya terkait dengan pokok bahasan, tetapi mengikutsertakan seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan KTM Lagita tersebut. Selain dari itu untuk melangkah pada kegiatan lain masing-masing pihak dapat saling menyesuaikan kegiatannya. Karena koordinasi merupakan suatu proses rangkaian kegiatan dengan maksud untuk

menyerasikan tiap-tiap langkah yang ada dalam masing-masing organisasi (Syaffrudin dalam Alfian, 2000:89).

Sejalan dengan itu (Sugandha dalam Alfian 2000:108) menegaskan organisasi dapat merupakan alat dari administrator (bupati) untuk mengkoordinasikan semua unit kerja (dinas dan instansi) dan semua sumber daya lainnya, karena itu harus ada kejelasan siapa yang harus melakukan, bagaimana hubungan antar orang dan kelompok orang sesuai dengan fungsinya, serta jelas adanya pemimpin-pemimpin kelompok (unit) yang harus diikuti petunjuk dan pengarahan-pengarrahannya oleh setiap bawahan.

Dilihat dari penerapan prinsip koordinasi merupakan pertemuan bersama-sama, pada pengujian data melalui pengecekan ulang dengan beberapa narasumber bahwa kesempatan rapat atau pertemuan pada dasarnya merupakan pemberitahuan dan meminta dukungan terhadap kegiatan yang ada. Selama proses pembangunan dan pengembangan KTM Lagita pertemuan-pertemuan bersama dilakukan pada tahap awal kegiatan. Pertemuan-pertemuan pada saat kegiatan berjalan sangat kurang dilakukan. Adapun kegiatan pertemuan dilakukan bersifat insidental.

Sehubungan dengan itu menurut Schroeff (dalam Alfian, 2000:120) bahwa administrasi meliputi kegiatan-kegiatan satu kelompok orang yang bekerjasama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk itu diperlukan koordinasi. Sedangkan untuk mewujudkannya diperlukan komunikasi bersama-sama melalui rapat atau pertemuan, karena media tersebut merupakan saluran komunikasi secara langsung antar sesama pihak-pihak yang terkait. Dengan komunikasi bersama-sama akan menghasilkan kepercayaan yang meningkat dan dapat menimbulkan interaksi yang lebih banyak diantara dinas/instansi terkait dengan

pembangunan dan pengembangan KTM Lagita.

Pemecahan Masalah dalam Pembangunan dan Pengembangan KTM Lagita

Selama proses kegiatan pembangunan dan pengembangan KTM Lagita berlangsung, berbagai permasalahan yang timbul perlu dicari jalan keluarnya melalui suatu koordinasi. Terutama permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan beberapa dinas atau instansi yang ada. Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, maka perlu dipecahkan secara terbuka dan komprehensif. Hal itu dilakukan dengan jalan semua pihak yang terkait dilibatkan dalam pemecahan masalah yang ada. Hal ini bertujuan agar masing-masing pihak dapat menyampaikan informasi menurut mereka masing-masing, selain itu untuk menghindari terulang kembali permasalahan serupa di kemudian hari.

Dari hasil wawancara proses pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita tidak terlepas dari masalah-masalah dalam proses pelaksanaannya. Masalah diselesaikan dalam suatu forum rapat/pertemuan dengan mengundang dinas/instansi yang terkait atau dinas/instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Pihak-pihak yang terkait dimintai keterangan terkait dengan permasalahan yang ada.

Sebagai tindak lanjut dan agar dapat memastikan masalah terpecahkan dengan baik biasanya diikuti dengan kegiatan terjun langsung kelapangan dalam upaya mengecek permasalahan yang ada. Informasi lain yang berhasil dihimpun bahwa dalam mengatasi persoalan yang ada pihak-pihak yang dilibatkan dalam pertemuan atau perundingan adalah hanya dinas instansi yang terkait dengan persoalan yang sedang dihadapi. Selain itu seringkali diantara kepala dinas- kepala dinas atau instansi yang diundang tersebut

hanya mengutus wakilnya untuk menghadiri kegiatan dimaksud. Keadaan ini dapat menghambat pelaksanaan koordinasi khususnya dalam pemanfaatan media rapat atau pertemuan.

Proses pembangunan dan pengembangan KTM Lagita pada pelaksanaannya di lapangan menyangkut berbagai bidang kegiatan yang banyak memiliki keterkaitan program tersebut dengan dinas dan instansi serta stakeholder lainnya. Dengan adanya keterkaitan program tersebut dengan dinas dan instansi serta stakeholder lainnya seringkali menimbulkan masalah yang perlu diatasi.

Dalam penanganan masalah yang terjadi antar unit organisasi, perlu adanya keterbukaan. Masing-masing pihak yang bertentangan perlu dimintai keterangan, disamping meminta masukan berbagai pihak yang hadir. Tindakan ini dilakukan dalam suasana bersama, dengan demikian masing-masing pihak dapat secara terbuka sehingga tidak menimbulkan saling curiga.

Hasil pengujian data lainnya sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi di atas bahwa dalam pertemuan yang dilakukan guna mengatasi persoalan yang ada lebih diarahkan agar masing-masing pihak yang terkait membantu mengatasi persoalan yang ada. Dengan demikian pada kegiatan pertemuan tersebut bukan mencari informasi guna pengambilan langkah-langkah yang diperlukan.

PENUTUP

Pelaksanaan koordinasi dalam proses pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. bahwa koordinasi dilakukan sejak awal kegiatan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Lagita.

2. Pelaksanaan koordinasi dengan pemanfaatan media koordinasi (surat, konsultasi, dan rapat/pertemuan) telah dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara dalam proses pembangunan dan pengembangan KTM Lagita.
3. Kegiatan koordinasi melalui rapat atau pertemuan dilakukan sejak pengusulan lokasi KTM Lagita, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengendalian pembangunan dan pengembangan KTM Lagita.
4. Dalam mengatasi masalah yang timbul selama kegiatan pembangunan dan pengembangan KTM Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak (instansi) yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang ada dipecahkan secara terbuka dalam upaya mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi tersebut.

Adapun kesimpulan lain yang bersifat teoritis, yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Koordinasi adalah suatu usaha untuk memadukan dan menyerasikan pelaksanaan antara kebijakan dari pemerintah pusat (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I) dengan kebijakan daerah agar masing-masing pihak dapat mencapai tujuan.

Oleh karena koordinasi menyangkut keterpaduan dan keserasian tugas masing- masing unit/bagian organisasi, maka dasar dari koordinasi adalah pelimpahan wewenang baik dari atas ke bawah (vertikal) maupun sesama unit/bagian yang setaraf (horizontal).

Saran agar pelaksanaan koordinasi dalam proses pembangunan dan pengembangan KTM Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara berjalan dengan baik , maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Hendaknya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara dalam pelaksanaan koordinasi dengan memanfaatkan media rapat/pertemuan, konsultasi, dan persuratan perlu dilakukan secara lebih optimal.
- 2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara hendaknya melakukan perencanaan dan penjadwalan yang rutin dalam melaksanakan rapat/pertemuan bersama.
- 3) Dalam menyelesaikan masalah selama proses pembangunan dan pengembangan KTM Lagita hendaknya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara tidak hanya melibatkan dinas/instansi terkait dengan persoalan yang dihadapi.
- 4) Hendaknya seluruh kepala dinas dan instansi serta stakeholder lainnya yang terkait dalam proses pembangunan dan pengembangan KTM Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara membangun kesadaran bersama untuk berkoordinasi dengan sumber daya yang ada.

REFERENSI

- Creswell, John W. (2003). *Research Design : Qualitatif, and Mixed Approach* (2nd ed).
- R.I Imam S. Ermawi. 2008. *Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007*
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan. Perkotaan dan Wilayah*. ITB. Bandung. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2012. *Profil dan Direktori*

- Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta : LP3ES
- Pemerintah Provinsi Bengkulu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2009. Rencana Detail Tata Ruang Pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Lagita Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.
- Priyono, dkk. 2010. Strategi Pengembangan Agribisnis di Kota Terpadu Mandiri Mesuji Provinsi Lampung. Leuser Cita Pustaka. Jakarta.
- Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi. 2011. Profil Kawasan Kota Terpadu Mandiri.
- Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi Departemen tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2009. Membangun Daerah Bersama Transmigrasi Sumatera.
- Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi Kemenakertrans R.I. 2012. Data Strategis Ketransmigrasian.
- Siagian, Sondang P. 2001. Administrasi Pembangunan, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Subagyo Joko. 2004. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuamtitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Syahmuddin. 2010. Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman Pada Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mahalona Kabupaten Luwu Timur. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 15 tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
- <http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/PaperUNHAS-KAPET.pdf> diakses 20 Desember 2013 pukul 13.00 WIB
- <https://sites.google.com/a/uptik.ipdn.ac.id/ilmu-kewilayahan/home/modul-perkuliahan/pengembangan-wilayah> diakses 20 Desember 2013 pukul 13.20 WIB
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31483/4/Chapter%20II.pdf> diakses 20 Desember 2013 pukul 13.40 WIB
- <http://www.damandiri.or.id/file/sulistio noi pbbab2.pdf> diakses 20 Desember 2013 pukul 14.00 WIB
- <http://lampost.co/berita/kota-terpadu-mandiri-mesuji-mati-suri> diakses pada Senin, 06/01/2014 13:44 WIB

<http://lampung.tribunnews.com/2013/02/08/beginilah-kondisi-kota-30WIB-terpadu-mandiri-mesuji-saat-ini> diakses pada Senin, 06/01/2014 13:50 WIB

<http://finance.detik.com/read/2010/03/08/134432/1313595/4/kota-terpadu-mandiri-bakal-jadi-magnet-investasi> diakses pada Senin, 06/01/2014 10:40 WIB

<http://www.beritasatu.com/ekonomi/10462-program-kota-terpadu-dinilai-tak-optimal.html> diakses pada Senin, 06/01/2014 11:25 WIB

<http://islamedia.web.id/2011/> diakses pada 22 Januari 2014 pukul 14 WIB.